

Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dulomo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo

Tri Utami Khairunissa Palahuwata, Lisda Van Gobel, dan Kurniadi K.Hasan
Administrasi Publik, Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial, Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: triutami3@gmail.com, lisdavangobel@gmail.com, yadiez@gmail.com.

Published: July , 2025

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemerintah Desa Dulomo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dalam Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah desa sebagai inovator, fasilitator dan motivator.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Dulomo dalam tiga indikator tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan beberapa dari pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya inovasi, minimnya fasilitas yang mendukung, dan kurangnya motivasi dalam pelatihan dan keterampilan dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas dan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat agar lebih efektif dan efisien serta mampu mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Peran Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan.*

ABSTRACT

The purpose of this study was to see how the Dulomo Village government, Tilango District, Gorontalo Regency, in Community Empowerment. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews and documentation. This study focuses on the role of the village government as an innovator, facilitator and motivator.

The results of the study indicate that the role of the Dulomo Village government in the three indicators has not been fully optimal. This is because some of its implementation still faces obstacles such as lack of innovation, minimal supporting facilities, and lack of motivation in training and skills in community empowerment. For this reason, it is necessary to increase capacity and participation in community empowerment to be more effective and efficient and able to realize independent and sustainable village development.

Keywords: *Role of Village Government, Community Empowerment, Welfare.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat memegang peranan yang penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan nasional di Indonesia. Pemerintah pusat adalah otoritas tertinggi dalam pemerintahan negara dan memiliki otoritas dalam menetapkan kebijakan di berbagai bidang seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Keterlibatan pemerintah pusat dalam pembangunan sangat penting karena memastikan bahwa kebijakan berlanjut, berkembang secara merata dan bahwa tujuan nasional yang ditetapkan oleh konstitusi dapat dicapai.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 1 bahwa, Presiden Republik Indonesia adalah pemerintah pusat, yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sari et al., 2024). Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengatur pembangunan di tingkat nasional, membuat peraturan dan memberikan anggaran untuk mendukung program pembangunan di seluruh negara. Pembangunan nasional adalah upaya pembangunan yang terus dilakukan di semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk menerapkan tujuan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang konstitusi 1945 yakni, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Suryanti, 2018). Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pembangunan nasional adalah serangkaian tindakan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Beberapa dokumen perencanaan, seperti rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dibuat oleh pemerintah pusat dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pembangunan di daerah mereka (Suryanti, 2018).

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk di tingkat desa, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat dilakukan secara individual atau dalam bentuk kelompok (keluarga) dengan harapan dapat membangun desa yang responsif dan memastikan hak-hak masyarakat (Umbu, 2019). Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan sosial dan pembangunan manusia. Oleh karena itu, untuk memperkuat desa diperlukan strategi hal ini sangat penting dalam pembangunan nasional untuk mengurangi jarak antara desa dan kota untuk meningkatkan kemandirian pada masyarakat desa (Panjaitan et al., 2019). Tujuan pembangunan nasional melalui penguatan desa diantaranya yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, membangun, kemandirian ekonomi desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, mendukung ketahanan pangan dan lingkungan hidup (Margayaningsih, 2018). Desa yang kuat memungkinkan pembangunan nasional berjalan lebih merata dan berkelanjutan, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antara

desa dan kota. Pembangunan desa memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup penduduk desa, serta menanggulangi kemiskinan. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pangemanan, 2017). Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok untuk mengelola kehidupan mereka secara mandiri sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa (Andni et al., 2023).

Desa Dulomo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat di Desa Dulomo Kecamatan Tilango, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Mata pencaharian masyarakat di Desa Dulomo yaitu sebagai petani (peternak dan berkebun) pedagang, pegawai swasta dan serabutan. Adapun bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah desa atau sebagai modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bantuan yang diberikan kepada pedagang, berupa bahan pokok sembako (barang harian) yang dapat dijual dan dijadikan sebagai sumber pendapatan sehari-hari. Bantuan tersebut dari dana pemerintah desa yang di berikan hanya sekali dalam setahun sebagai modal, modal tersebut diharapkan pemerintah desa agar dapat berkembang dan bisa membantu perekonomian bagi masyarakat. Adapun bantuan secara ekonomi dibawa, masyarakat desa yang bermata pencaharian petani (pekebun) diberikan oleh pemerintah desa berupa modal bibit untuk tanaman, tidak hanya itu petani (peternakan) juga diberikan modal berupa bibit hewan ternak yang kemudian dipelihara dan dikembangkan dan hasilnya dijual, sebagai penunjang ekonomi untuk membantu kesejahteraan masyarakat tersebut. Namun, bantuan tersebut ada yang berhasil dikembangkan ada juga yang tidak, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah desa bahwa diperlukan peran pemerintah desa dalam membantu warga desa untuk menjadi lebih aktif dan produktif. Peran pemerintah desa di tingkat desa, upaya pemberdayaan mencakup pelatihan kerja, penyuluhan pertanian, penguatan usaha kecil, dan menengah, serta masyarakat desa diharapkan lebih sejahtera dan dapat bersaing di era globalisasi dengan program-program ini.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan (Hariyanto, 2021). Melalui berbagai program dan kebijakan, pemerintah desa berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat (Arsana et al., 2022). Dalam proses pembangunan desa, pemerintah desa dapat berperan sebagai inovator, motivator, dan fasilitator untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat selaras dengan

aspirasi masyarakat lokal. Pemerintah desa sebagai inovator harus memiliki kemampuan untuk memberikan inovasi dan perubahan dengan membuat program pembangunan desa yang mudah dipahami dan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Widayanti, 2020). Selanjutnya, peran pemerintah desa sebagai fasilitator, pemerintah desa memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam pembangunan desa, dengan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan, mewujudkan lingkungan yang dapat mendukung pembangunan serta menjembatani beragam kepentingan masyarakat secara optimal (Hasan et al., 2024) dan peran pemerintah sebagai motivator, pemerintah desa bertanggung jawab untuk mendorong kemajuan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan seperti: sosial, ekonomi, pendidikan, dan pembangunan. Pemberdayaan adalah suatu komponen yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan kelompok. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudayana (dalam Gobel et al., 2022) bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk mengatur dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dengan memasukkan nilai-nilai sosial untuk kepentingan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan Pembangunan alternatif yang bertujuan agar masyarakat mampu berdaya secara mandiri dalam mencukupi segala keperluan hidup sehari-hari (Sihombing et al., 2021).

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan, antara lain: Pertama, pemerintah Desa Dulomo masih kurang memberikan inovasi-inovasi baru dalam sebuah program dan kegiatannya seperti, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program pemberdayaan kelompok rentan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan terhadap anak serta lansia, selain itu masyarakat desa juga sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan serta ketahanan sosial melalui nilai-nilai budaya dan gotong royong.

Kedua pemerintah Desa Dulomo masih kurang dalam memberikan fasilitas untuk menjembatani kebutuhan warga dan menyediakan sarana demi kesejahteraan masyarakat, seperti pendampingan usaha, pelatihan tenaga kerja, serta pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan desa untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

Ketiga yaitu pemerintah Desa Dulomo masih kurang memberikan motivasi baru yang mampu memberikan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, seperti pelatihan pertanian modern, kewirausahaan, hingga pengelolaan keuangan. Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, masyarakat desa dapat lebih mandiri dan berdaya saing.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga tahap yakni: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Dulomo bermula saat Raja Tilahunga dan rombongannya menjelajahi daerah baru. Mereka sampai di titik temu dua aliran air, yaitu Danau Limboto dan Sungai Bulango. Warga setempat menyebutkan tempat itu "TAMAO", yang dalam bahasa Gorontalo artinya "terbuka lebar". Sungai yang mereka jumpai itu dinamakan "Modelomo" karena kedalamannya yang luar biasa. Untuk menandai keberhasilan Raja Tilahunga melewati sungai yang menantang itu, seiring waktu, wilayah ini tumbuh menjadi perkampungan yang ramai dan akhirnya ditetapkan sebagai Desa Dulomo dengan seluas 50 hektar. Kini, nama Dulomo menjadi pengingat akan keberanian dan perjuangan raja demi kesejahteraan rakyatnya.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai inovator masih belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi dan kurangnya pendampingan, serta evaluasi pemerintah desa yang dinilai kurang intensif. Selain itu, kekurangan anggaran dana desa yang dapat menyebabkan keterbatasan pemerintah desa dalam pemberian bantuan, sehingga ada dari beberapa program bantuan yang telah dihapus. Masyarakat berharap agar bantuan tersebut bisa diadakan kembali karena program tersebut sangat berguna bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil-kecilan.

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator belum menunjukkan adanya kemajuan dalam pemberian fasilitas. Hal ini, tidak luput dari perhatian masyarakat kepada pemerintah desa agar dapat memberikan pendampingan, evaluasi dan pengelolaan sumber daya desa secara inovatif. Meskipun belum semua program yang berjalan secara optimal, setidaknya pemerintah desa berkomitmen dalam terus memperbaiki dan mengembangkan fasilitas yang ada, agar hal ini dapat terarah pada pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Peran pemerintah desa sebagai motivator masih belum optimal hal ini, dikarenakan masih adanya masyarakat yang mengeluh akan pendampingan pemerintah desa yang masih belum optimal dalam pemberian pelatihan untuk pengetahuan masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan.

PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa sebagai Inovator

Pemerintah desa sebagai inovator sangat berperan penting dalam menciptakan dan mengembangkan, serta menerapkan ide-ide baru untuk dapat mengatasi

permasalahan yang ada di desa. Dalam peran ini, pemerintah desa diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan, tantangan, serta kondisi yang terjadi diantara masyarakatnya, serta memberikan tanggapan melalui berbagai inisiatif yang kreatif.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan oleh peneliti bahwa peran pemerintah sebagai sebagai inovator, menunjukkan belum optimal, hal ini dikarenakan pemerintah desa belum aktif dan adaptif dalam memberikan gagasan dan dapat merencanakan program yang lebih matang, dan pemerintah desa belum menjalankan program tersebut secara inovatif sesuai pada potensi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah desa diharapkan agar lebih melakukan pendekatan yang partisipatif, evaluatif agar keberlanjutan untuk mendukung keberhasilan inovatif kepada masyarakat dapat berhasil. Temuan ini sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh (Tohir et al., 2023) peran pemerintah desa sebagai inovator, pemerintah desa harus berfungsi sebagai sumber utama dalam menciptakan berbagai hal baru yang bersifat inovatif serta pendekatan dengan metode-metode baru yang dapat diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah *“problem solving” dan “action oriented”*.

Kesimpulannya bahwa peran pemerintah desa sebagai inovator masih kurang optimal dalam memberikan gagasan atau ide-ide baru yang kreatif dan merancang program-program yang terencana dan terstruktur sehingga dapat mengembangkan potensi desa dan sejahtera.

Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator sangat berperan penting sebagai penghubung, pendukung dan pendorong untuk masyarakat dalam hal proses pembangunan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa tidak beroperasi sendirian melainkan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat terlibat secara aktif dalam, merumuskan, dan mengevaluasi pada program pembangunan di desanya.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan oleh peneliti bahwa peran pemerintah sebagai sebagai fasilitator, menunjukkan belum optimal, hal ini dikarenakan pemerintah desa sebagai fasilitator, masih terdapat kendala pada ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola bantuan dari pemerintah desa dengan baik, hal ini disebabkan karena kurangnya pemberdayaan dalam bentuk pelatihan, pengawasan dan pendampingan teknis dari pihak pemerintah desa. Dengan adanya hal ini, menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan yang lebih signifikan lagi, tidak hanya dalam menyiapkan fasilitas, tetapi juga dalam membimbing, mengevaluasi, dan membina masyarakat secara aktif. Temuan ini sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh (Ahmar et al., 2016) peran pemerintah desa sebagai fasilitator sangat penting proses pembangunan. Peran ini tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur dan fasilitas fisik atau bantuan langsung, akan tetapi pemerintah juga perlu memberikan bimbingan teknis dan non-teknis secara

berkelanjutan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memotivasi dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola infrastruktur serta sarana pemberdayaan sendiri, serta dapat melaksanakan kegiatan pendukung lainnya secara mandiri.

Kesimpulannya bahwa peran pemerintah desa sebagai fasilitator masih kurang optimal dalam mengimplementasikan pengelolaan bantuan pada masyarakat. Pemerintah desa belum mampu mengelola bantuan tersebut dengan baik. Hal ini disebabkan kurangnya pelatihan dan pendampingan serta keterampilan teknis dari pemerintah desa.

Peran Pemerintah Desa sebagai Motivator

Peran pemerintah desa sebagai motivator adalah pondasi penting dalam membangun semangat yang kolektif bagi masyarakat agar terlibat aktif dalam pembangunan desa. Dengan memberikan motivasi yang kuat dapat mendorong masyarakat lebih aktif, mandiri, dan kreatif dalam mengelola potensi desa. Tidak hanya itu masyarakat juga memerlukan pemimpin desa yang inspiratif dan penuh semangat sehingga dapat menjadi kekuatan sebagai penggerak utama untuk menuju pada desa yang maju dan mandiri.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan oleh peneliti bahwa peran pemerintah sebagai motivator, menunjukkan belum optimal. Hal ini dikarenakan, pemerintah desa yang hanya berfokus pada satu aspek, yaitu pemberian bantuan tanpa diiringi dengan pengawasan, pendampingan edukatif atau pelatihan secara berkelanjutan. Sehingga hal ini, menyebabkan kebanyakan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri yang cukup untuk mengelola bantuan secara mandiri dan berkelanjutan. Selain dari pada itu, pemberian bantuan yang tidak diikuti dengan motivasional yang kuat dapat menciptakan rasa ketergantungan masyarakat pada bantuan yang diberikan. Sehingga hal ini, dapat menghambat proses pemberdayaan yang pada sejatinya untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu berdaya saing. Temuan ini sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh (Essa Rella Pangestu, 2016) peran pemerintah desa sebagai motivator, motivasi yang dapat diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat ditunjukkan melalui dorongan untuk semangat agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa dan pengelolaan pada program pemberdayaan.

Kesimpulannya peran pemerintah desa sebagai motivator, pemerintah desa perlu adanya dorongan pada kemampuan dan antusiasme masyarakat supaya mereka tidak hanya menunggu bantuan, tetapi juga bisa mandiri. Dengan hal ini pemerintah desa akan lebih berhasil dalam meningkatkan kesadaran, rasa percaya diri, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa.

KESIMPULAN

Peran pemerintah desa sebagai inovator harus dapat memberikan gagasan atau ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat serta memberikan pelatihan dan pendampingan secara rutin, dan memiliki kemampuan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan inovatif yang berdampak nyata.

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator, pemerintah desa diperlukan pendataan dan pemetaan kembali terkait apa yang sangat diperlukan atau yang menjadi kebutuhan masyarakat secara berkala agar bantuan, pelatihan, dan fasilitas yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat.

Peran pemerintah desa sebagai motivator, pemerintah desa perlu adanya dorongan pada kemampuan dan antusiasme masyarakat supaya mereka tidak hanya menunggu bantuan, tetapi juga bisa mandiri. Dengan hal ini pemerintah desa akan lebih berhasil dalam meningkatkan kesadaran, rasa percaya diri, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa. Secara keseluruhan, pemerintah desa harus dapat memaksimalkan fungsinya sebagai peran pemerintah desa sebagai inovator, fasilitator, dan motivator dengan menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif, menyelaraskan program dengan kebutuhan masyarakat, serta mendorong kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa yang efisien dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmar, Mappamiring, & Parawangi, A. (2016). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 120–136.
- Andni, R., Indriyani, N., Anggraeni, R. N., Sholikhah, F. I., Ulfa, M., & Aini, I. N. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus). *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i1.147>
- Arsana, I. K. S., Gintulangi, S. O., Hasan, K. K., & Olilingo, F. Z. (2022). Analisis Pengembangan Ekonomi Pertanian Berkelanjutan Dan Konservasi Danau Limboto Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Di Gorontalo. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 934–947. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.21219>
- Essa Rella Pangestu, D. (2016). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Untuk Mewujudkan Community Based Tourism (CBT). 1–23.
- Gobel, L. Van, Alhadar, S., Mahmud, R., Sahi, Y., & Mahadi, R. (2022). Optimalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Gula Semut Berbasis Digital Marketing. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 80–86.

<https://doi.org/10.35311/jmpm.v3i2.74>

- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Hasan, K. K., Pakaya, N. A., & Pariono, A. (2024). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Ponelo Kabupaten Gorontalo Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research Volume*, 4, 14110–14116.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Panjaitan, E., Dewi, R., & Angelia, N. (2019). Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. *Perspektif*, 8(1), 32–38. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i1.2543>
- Sari, D. N., Chandia, E. A., Maulida, M., & W, N. A. F. (2024). Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Perspektif Hukum Tata Negara. 4.
- Sihombing, B., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2021). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Di Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. *Jurnal Regional Planning*, 3(2), 110–124. <https://doi.org/10.36985/jrp.v3i2.628>
- Suryanti, H. (2018). Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional. *Meraja Journal*, 1(3), 55–65. <https://media.neliti.com/media/publications/284688-sistem-perencanaan-pembangunan-dalam-pen-eb279cb3.pdf>
- Tohir, R., Purnamasari, H., & Aditya, I. (2023). Peran Pemerintah Desa : Pengembangan UMKM di Desa Wisata Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. *Jurnal Trias Politika*, 7(2), 293–310.
- Umbu, Y. (2019). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- Widayanti, F. (2020). *Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico*. *Jurnal Sociopolitico*, 2(i), 89–99.